BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan media sosial saat ini digunakan sebagai media untuk berinteraksi dengan orang lain dan menggunakannya untuk memperluas jaringan. Interaksi antara masyarakat melalui media sosial menjadikan media sosial sebagai salah satu media yang bermanfaat bagi sebuah bisnis. Banyak bisnis yang menggunakan media sosial sebagai tempat yang potensial untuk menjual produknya. Dengan perkembangan perdagangan sosial, banyak orang mulai mempromosikan bisnis pada media sosial. (Rahayu & Baridwan, 2020). Sejumlah langkah terus dilakukan, termasuk perluasan ekosistem QRIS, penggunaan *big data*, aplikasi API (*Application Programming Interface*), serta penguatan pengawasan *fraud* dan *siber* pada pembayaran digital (Dylan Trotsek, 2020).Untuk mendukung *e-commerce*, diperlukan adanya suatu sistem pembayaran berbasis internet (*internet payment system*) yang mengubah sistem pembayaran tradisional atau manual menjadi sistem pembayaran *online*. Melihat trend yang berkembang saat ini, beberapa *Marketplace* mulai menggunakan sistem QR-Code sebagai metode pembayarannya. Sistem tersebut mengubah kebiasaan masyarakat banyak dari yang semula melakukan pembayaran *cash* menjadi *cashless*. Namun, tidak semua orang mengetahui dan paham mengenai sistem pembayaran *cashless*. Untuk melakukan pembayaran elektronik / *cashless* masyarakat harus melek teknologi. Penerapan sistem pembayaran elektronik berbasis QR-Code memang dinilai efisien dalam berbagai aspek (Manurung & Lestari, 2020).

Cashless mengarah pada masyarakat yang dalam bertransaksi, tidak lagi menggunakanuang fisik, melainkan melalui perpindahan informasi finansial secara digital. Dalam bertransaksi sehari-hari, masyarakat tidak menggunakan uang nyata, melainkan uang digital (Bintarto, 2018).

Layanan sistem pembayaran yang kini sedang berkembang pada masyarakat secara umum yaitu dengan menggunakan *scan* QR code. QR Code adalah serangkaian kode yang memuat data/informasi seperti identitas pedagang/pengguna, nominal pembayaran, dan/atau mata uang yang dapat dibaca dengan alat tertentu dalam rangka transaksi pembayaran. QR code merupakan teknologi yang memungkinkan kita untuk menyimpan informasi dalam bentuk kode, seperti sekumpulan titik hitam. Dahulu untuk membaca kode QR diperlukan aplikasi khusus, namun seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, saat ini cukup hanya menggunakan kamera *handphone* maka informasi langsung muncul. Kode QR digunakan untuk keperluan luas salah satunya adalah sebagai alternatif cara pembayaran. Sistem pembayaran yang berkembang di Indonesia yang menggunakan kode QR bersumber dari kode QR yang berbeda-beda, dengan alasan tersebut Bank Indonesia membuat suatu standarisasi sistem pembayaran berbasis kode QR, sehingga kode QR yang tadinya *eksklusif* atau hanya dapat dibaca oleh penerbitnya saja kini jadi lebih *inklusif* yaitu dapat dibacaoleh penerbit yang lain atau yang di sebut QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) (BankIndonesia, 2020) . QRIS dirilis Bank Indonesia sejak 17 Agustus 2019, namun efektif digunakan pada tanggal 1 Januari 2020 (liputan6, 2020). Kehadiran QRIS diharapkan mampu mengintegrasi seluruh transaksi semua lini.

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) merupakan kode QR yang diterbitkan Bank Indonesia dan sudah distandarisasi sehingga dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran berbasis kode QR, seperti OVO, GoPay, LinkAja, Dana, dan sebagainya. QRIS disediakan oleh *merchant* atau penjual, sedangkan konsumen menggunakan dompet digital, *mobile banking* atau uang elektronik berbasis server. Pengimplementasinya dapat di gambarkan seperti berikut, untuk kartuATM Bank Indonesia memiliki GPN (Gerbang Pembayaran Nasional), sedangkan kode QR Bank Indonesia memiliki QRIS. QRIS dapat digunakan oleh semua kalangan mulai dari pedagang kecil sampai *merchant* yang ada di *mall*, karena kode QRIS dapat diprint dengan kertas biasa tanpa harus menggunakan mesin edc. QRIS bukan aplikasi baru atau instrumen pembayaran, namun semacam interface (Bank Indonesia 101, 2020). Peluncuran QRIS merupakan salah satu implementasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang telah dicanangkan pada Mei 2019 lalu. Dalam peluncuran tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan bahwa QRIS yang mengusung semangat UNGGUL (UNiversal, GampanG, Untung dan Langsung), bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk Indonesia Maju. Semangat ini sejalan dengan tema HUT ke–74 Kemerdekaan RI yaitu SDM Unggul Indonesia Maju. QRIS UNGGUL mengandung makna, yaitu Pertama, UNiversal, penggunaan QRIS bersifat inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di domestik dan luar negeri. Kedua, GampanG, masyarakat dapat bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu genggaman ponsel.

Ketiga, Untung, transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel. Keempat, Langsung, transaksi dengan QRIS langsung terjadi, karena prosesnya cepat dan seketika sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran(bi.go.id, 2019).

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) disusun oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang menggunakan standar Internasional Emv Co. QRIS merupakan standar QR code untuk pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet digital, atau *mobile banking*. Setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP)yang menggunakan sistem QR wajib mengadopsi QRIS. Hal ini diatur dalam PADG No.21/18/2019 tentang standar internasional QRIS untuk pembayaran (Mulia, 2019). Layanan QRIS untuk semua penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) berbasis kode QR yang umum digunakan oleh masyarakat seperti OVO, GoPay, LinkAja, Dana, dan sebagainya. QRIS memiliki beberapa manfaat sebagaiberikut : Pertama proses transaksi lebih mudah. Tidak dipungkiri lagi, kehadiran QRIS otomatis membuat proses transaksi menjadi lebih mudah dan praktis. Hanya diperlukan memiliki satu QR code saja untuk melayani berbagai aplikasi pembayaran digital yang sudah mendapatkan izin di Indonesia. Setiap satu *merchant* hanya perlu menempelkan QR code yang didapat dari QRIS. Kedua mencegah beredarnya uang palsu. Manfaat yang kedua adalah mengurangi risiko mendapatkan uang palsu. QRIS merupakan kode pembayaran digital. Dengan demikian, tidak ada lagi pertukaran uang tunai yang terjadi. Hal ini juga berarti kemungkinan mendapatkan uang palsu semakin kecil, termasuk juga mencegah

penyakit yang dapat ditularkan melalui bersentuhan langsung di saat musim pandemi Covid-19 seperti sekarang ini yang dapat ditularkan melalui uang tunai. Ketiga pendaftaran *merchant* atau toko lebih mudah. Keuntungan yang ketiga ada pada pendaftaran *merchant* atau toko yang lebih mudah. Tanpa QRIS, anda memerlukan untuk mendaftar sebagai *merchant* di aplikasi pembayaran digital terlebih dahulu, namun dengan QRIS hanya melakukan pendaftaran sekali saja untuk menerima pembayaran digital melalui aplikasi apapun.

Dampak pandemi covid-19 pada perekonomian mengakibatkan pendapatan mengalami penurunan, mengingat bahwa Provinsi Bali mengandalkan hasil pariwisata sebagai sumber pendapatan terbesanya. Namun pada masa pandemi mengalami penurunan yang signifikan. Beberapa perusahaan juga mem-PHK karyawannya karena penurunan wisatawan yang berkunjung ke Bali, hal ini dikarenakan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) (detiknews, 2021). Pada saat ini dapat kita amati banyaknya usaha-usaha kecil yang bermunculan, hal ini tentu akan memberikan dampak yang baik bagi perkembangan perekonomian. Tentunya dengan hal tersebut setiap UMKM akan melakukan inovasi sehingga dapat bersaing. Tantangan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam menghadapi kemajuan teknologi termasuk di bidang keuangan, yang sangat membutuhkan upaya keras dalam menguasai berbagai aturan sistem yang menjanjikan keuntungan besar bagi pengembangan ke depannya. Sektor UMKM di Kabupaten Buleleng dalam menopang perekonomian masyarakat Buleleng berkembang dengan baik. Perkembangannya dapat dilihat dari meningkatnya

Jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Tahun 2019. Buleleng memiliki UMKM sebanyak 34.374 unit. Jumlah ini sangat besar sehingga kontribusi UMKM terhadap perekonomian Buleleng sangat dirasakan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja (Umkm & Buleleng, 2020). Masyarakat Bali menganggap kota Singaraja sebagai kota pendidikan. Anggapan tersebut tidak terlepas dari eksistensi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) sebagai salah satu universitas besar di Bali yang kehadirannya memberikan kontribusi cukup signifikan sebagai pencetak akademisi (Wirawan & Kurniawan, 2017). Dengan sebutan kota pendidikan dari masyarakat inilah yang membuat mahasiswa baik dari luar kabupaten Buleleng maupun dari luar Provinsi Bali datang untuk melakuan pendidikan di Singaraja. Berdasarkan pernyataan dari Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ST yang dikutip dalam situs resmi umumsetda Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa dipilihnya Buleleng sebagai penerapan berbasis digital yaitu QRIS, tentu saja bukan tanpa dasar. Kabupaten Buleleng sebelumnya masuk dalam kategori zona merah covid-19 namun saat ini Kabupaten Buleleng sudah masuk dalam kategori zona hijau. Sehingga penerapan QRIS dapat membantu meminimalisir terjadinya paparan covid-19 pada kegiatan ekonomi yang terjadi dalam tatanan kehidupan era baru yang dibuka untuk Provinsi Bali secara regional saat ini. Selain itu juga transaksi berbasis digitali sebagai upaya memotong mata rantai penularan covid-19. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan bahwadengan adopsi QRIS akan membuka pasar lebih luas sehingga *merchant* dapat

memasarkan produk lewat *marketplace*. Kondisi seperti ini dapat menguntungkan pelaku UMKM yang tidak perlu lagi bergantung pada pameran agar produknya dilirik pasar.

Kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho menilai per tanggal 15 Januari 2021 tercatat sebanyak 179.283 *merchant* yang mengadopsi QRIS di Bali, yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Persentase penggunaan QRIS tertinggi berada di Kota Denpasar sebanyak 49% dengan jumlah 88.238 *merchant*. Kedua yaitu Badung dengan persentase 28% atau 49.497 *merchant*. Ketiga yaitu Gianyar dengan persentase 8% atau 14.159 merchant. Kabupaten Buleleng berada pada peringkat ke empat dengan persentase 6%, Kabupaten Tabanan berjumlah 4%, Kabupaten Jembrana dengan persentase 2%, Kabupaten Klungkung sebanyak 2%, Kabupaten Karangasem 2%, dan terakhir Kabupaten Bangli hanya 1% (Wiratmini, 2021). Dengan peringkat persentase rendah dibandingkan dengan kota Denpasar, Badung serta Gianyar, Kabupaten Buleleng terus melakukan perluasan penggunaan QRIS pada sektor UMKM. Serta perlu adanya suatu kajian tentang penerapan sistem pembayaran QRIS.

Kota Singaraja merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buleleng (Singaraja, n.d.). Wilayah dengan salah satu penopang perekonomian pada sektor UMKM, disamping sektor pertanian dan pariwisata, dimana UMKM sebagai penyedia lapangan kerja terbanyak untuk masyarakat Buleleng (Balitbang, 2020). Kota Singaraja merupakan lokasi pertama diterbitkannya sistem pembayaran QRIS di Kabupaten Buleleng yaitu pada Lapak Kuliner Taman Kota Singaraja, sasaran utamanya yaitu pada UMKM (Sugiari, 2020).

Sejalan dengan adanya pandemi Covid-19, dimana di era pandemi seperti sekarang ini kita diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan salah satunya adalah menjaga jarak atau *social distancing*. Berdasarkan data UMKM yang dihimpun dari dinas perdagangan, perindustrian dan koperasi, usaha kecil dan menengah, pada kabupaten Buleleng, tercatat jumlah perkembangan UMKM berdasarkan sektor usaha pada tahun 2020 baik itu dari perdagangan, perindustrian, pertanian, dan jasa sebanyak 54.489 usaha. Begitu juga jumlahperkembangan UMKM berdasarkan klasifikasi usaha di Kabupaten Buleleng tahun 2020 baik itu usaha mikro, kecil, menengah dan besar berjumlah 54.489 usaha. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan agar sektor perdagangan serta UMKM dapat mendorong ekonomi lokal dalam penerapan tatanan kehidupan era baru melalui sistem transaksi pembayaran digital menggunakan QRIS, diharapkan dapat semakin mendorong percepatan dan perluasan penggunaan QRIS di Pulau Dewata khususnya di Kabupaten Buleleng (Sugiari, 2020). Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran: (1) sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, (2) penyedia lapangan kerja terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) kontribusinya terhadap neraca pembayaran. Selain itu, UMKM juga memiliki peran penting khususnya dalam perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta UMKM juga berperan dalam pembangunan

ekonomi pedesaan (Umkm & Buleleng, 2020). Implementasi uang elektronikyang telah digunakan untuk pembayaran secara *online* maupun *offline* dapat memudahkan para pedagang untuk bertransaksi, khususnya UMKM. Adanya kerjasama antara para pelaku UMKM dengan pihak penyelenggara uangelektronik akan meningkatkan keuangan *inklusif* serta memajukan perekonomian Indonesia. Banyaknya produk uang elektronik dan diiringi perkembangan UMKMyang begitu pesat, akan memberikan kemudahan bagi para UMKM untuk melakukan transaksi dan juga para pelanggannya. Keuntungan dari adanya uang elektronik ini memudahkan para UMKM untuk tidak kesulitan mencari uangkembalian kepada pelanggan dan pihak pelanggan tidak perlu membawa banyak uang kartal ketika berbelanja. (Sihaloho et al., 2020).

Pada tanggal 5 Juli 2020, pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan surat edaran no. 3355 tahun 2020 tentang protokol tatanan kehidupan era baru di 14 sektor yang mencakup penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, serta usaha sektor jasa dan perdagangan dimana didalamnya mendorong penggunaan transaksi secara non tunai sebagai tatanan kehidupan yang baru (PenaBali, 2020). Penerapan QRIS merupakan sebuah inovasi baru dalam sistem pembayaran, yang dirilis pada tanggal 17 Agustus 2019 dan baru efektif digunakan pada tanggal 1 Januari 2020. Peluncurannya yang dapat dikatakan terbaru ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dikutip dari laman resmi warta ekonomi, menyatakan bahwa peluncuran sistem pembayaran melalui QRIS mendapat sambutan baik dari *merchant* maupun pengguna (konsumen), namun sebaliknya terdapat beberapa pihak yang meragukan tentang keamanan serta keefektifan sistem pembayaran ini. Sistem pembayaran melalui

QRIS menimbulkan polemik di kalangan masyarakat maupun *merchant*. Pada *merchant*, penerapan QRIS masih dirasa membebankan pihak *merchant* karena pengenaan *merchant discount rate* (MDR) yaitu sejumlah 0,7% dari tiap transaksi. MDR merupakan potongan yang dikenakan oleh bank penyedia jasa QRIS dari setiap transaksi yang melibatkan sistem pembayaran QRIS. Menurut Shintia Xu, *head of business marketing fore*, menyatakan bahwa penetapan standar MDR 0,7% tersebut justru menguntungkan karena pemilik *merchant* tidak perlu bernegosiasi dengan pihak penyedia jasa QRIS terkait MDR yang harus dikenakan (Atmika, 2020).

Hasil penelitian Atmika (2020) bahwa penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan *dana punia* pada Pura Jagatnatha kota Singaraja, dinilai kurang efektif karena kurangnya sosialisasi, pola pikir pemedek yang konvensional dan kurangnya nilai spiritual sehingga tidak dapat memberikan peningkatan yang signfikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana punia di Pura Jagatnatha Singaraja. Hasilpenelitian yang dilakukan Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, Suci Rahmayanti (2020) bahwa QRIS mempunyai manfaat bagi para UMKM di Medan, dengan mengkaji penerapan QRIS pada UMKM, dan memaparkan peranan, kendala, dan pendapatan UMKM dengan adanya QRIS.

Hasil penelitian Mayanti (2020) bahwa peneliti menganalisis penerimaan masyarakat terhadap penerapan *Quick Response* Indonesia *Standard* sebagai teknologi untuk metode pembayaran non tunai dengan menggunakan metode *Unified Theory of Acceptance and Use Technology 2*. Menunjukan hasil bahwa *Facilitating Condition* dan *Hedonic Motivation* memiliki pengaruh positif yang

terhadap *Behavior Intention*, serta *Behavior Intention* juga memiliki pengaruh positif yang terhadap *Use Behavior*.

Hasil penelitian Saputri (2020) bahwa secara simultan seluruh faktor persepsi memiliki pengaruh terhadap preferensi konsumen menggunakan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran digital, sedangkan berdasarkan hasil pengujian individual, faktor persepsi kemanfaatan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat penggunaan QRIS, sedangkan faktor persepsi lainnya diperoleh hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap minat konsumen dalam menggunakan QRIS. Hal ini sesuai dengan hasil odd ratio bahwa kecenderungan atau peluang persepsi kemanfaatan mempengaruhi minat konsumen dalam menggunakan QRIS sebesar 99,549 kali. Hasil penelitian Setiawan dan Mahyuni (2020) bahwa Penelitian ini mengindikasikan bahwa UMKM memiliki persepsi positif terhadap QRIS, sebagai alternatif cara pembayaran yang mudah dan dapat mengurangi kontak fisik. Penelitian ini juga menemukan bahwa intensi UMKM menggunakan QRIS dipengaruhi oleh: 1. Persepsi positif terhadap QRIS; 2. Pengaruh pihak luar,antara lain pembeli, teman dekat, dan para influencer; 3. Persepsi hambatan menggunakan QRIS, antara lain kualitas koneksi internet, biaya penggunaan, dan batas transaksi (Ekonomi & Nasional, 2020). QRIS sebagai alat pembayaran yang menguntungkan, sebagai alternatif pembayaran, lebih higienis karena dapat mengurangi kontak fisik, mudah digunakan, memudahkan pembayaran, bentuk sederhana, hanya perlu menempatkan QR code di depan meja kasir. QRIS dipahami sebagai bentuk kode batang digital yang memberi fasilitas pencatatan transaksi digital serta pembayaran digital.

Penelitian ini ingin menguji tentang penerapan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada pelaku UMKM di kota Singaraja sebagai sistem pembayaran di era digital melihat adanya pro dan kontra dalam penerapannya. Kebaruan dalam penelitian ini adalah menguji efektivitas penggunaan aplikasi QRIS kepada UMKM di kota Singaraja yang merupakan tahap awal pengenalan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sekaligus pengenalan digitalisasi perekonomian pada UMKM kota Singaraja, dimana kabupaten Buleleng dengan ibu kotanya Singaraja merupakan wilayah dengan salah satu penopang perekonomian pada sektor UMKM, disamping sektor pertanian dan sektor pariwisata. UMKM sebagai penyedia lapangan kerja terbanyak untuk masyarakat Buleleng. Hal ini juga dapat dilihat berdasarkan data UMKM yang dihimpun dari dinas perdagangan, perindustrian dan koperasi, usaha kecil dan menengah, pada kabupaten Buleleng, tercatat jumlah perkembangan UMKM berdasarkan sektor usaha pada tahun 2020 baik itu dari perdagangan, perindustrian, pertanian, dan jasa sebanyak 54.489 usaha. Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan wawasan terhadap pembaca tentang bagaimana penerapan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada UMKM kota Singaraja di era digital, dengan melihat bagaimana peranan, apa saja kendala dan bagaimana evaluasi efektifitas penerapan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada UMKM kota Singaraja Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka judul dalam penelitian ini yaitu "**Analisis Penerapan Sistem Pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Terhadap UMKM Kota Singaraja Pada Masa Pandemi Covid-19''**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan pemaparan pada latar belakang, adanya permasalahan yang muncul pada penerapan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian yang berhubungan dengan penerapan sistem *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang menghasilkan pada wilayah tertentu atau keadaan tertentu sistem QRIS dapat berjalan dan memiliki pengaruh positif terhadap aktivitastransaksi non tunai baik itu pada UMKM sedangkan penelitian lain menghasilkan bahwa sistem QRIS tidak dapat dijalankan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem pembayaran non tunai berbasis digital seperti *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah mengenai penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pengidentifikasian peranan, kendala dan evaluasi efektivitas penerapan sistem pembayaran QRIS pada UMKM Kota Singaraja sebagai kota pertama dalam penerapan QRIS di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada UMKM di Kota Singaraja selama masa pandemi Covid-19?

2. Apakah kendala penerapan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada UMKM di Kota Singaraja selama masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana evaluasi efektivitas penerapan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada UMKM di Kota Singaraja selama masa pandemi Covid-19?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada UMKM di Kota Singaraja selama masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui kendala penerapan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada UMKM di Kota Singaraja selama masa pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui evaluasi efektivitas penerapan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada UMKM di Kota Singaraja selama masa pandemi Covid-19.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis:

Secara teoritis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat untuk sumbangan pengetahuan, wawasan, informasi serta referensi selanjutnya khususnya bagi penulis dan pelaku UMKM dalam hal tentang penerapan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada UMKM di Kota Singaraja pada masa Pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi penulis sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan bagipenelitian berikutnya.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai gambaran oleh pemerintah, berdasarkan pengamatan langsung dilapangan yaitu pada UMKM Kota Singaraja yang menerapkan QRIS dalam hal penetapan suatu kebijakan untuk mendukung perkembangan digitalisasi khususnya pada bidang pembayaran berbasis digital.

c. Bagi Bank Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu evaluasi berdasarkan data dilapangan yaitu pada UMKM Kota Singaraja yang mengadopsi QRIS, mengenai keefektivitasan penggunaan sistem pembayaran melalui QR code QRIS.